

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Negara yang berdasarkan demokrasi akan mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia mengadakan Pemilu setiap lima tahun sekali.

Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni; pertama, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; kedua Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat “Proses penyampaian aspirasi, kepentingan dan tuntutan rakyat terhadap lembaga politik yang ada seperti DPR/MPR/PDP/DPRD”; ketiga, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya, dan keempat, Pemilu diselenggarakan dengan dana yang tidak kecil (Nasution, 2017).

Fenomena dalam Pemilu secara tidak langsung memberikan gambaran keterkaitan antara faktor ekonomi dengan kandidat. Seperti diketahui bahwa untuk melakukan kampanye para kandidat akan membutuhkan dana yang besar, misalnya untuk biaya kendaraan kandidat, biaya pembelian waktu tayang untuk iklan di televisi, radio, poster, benner, dan media-media lain, serta persiapan dana untuk “hadiah”, oleh karena itu kandidat akan berupaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanye.

Kondisi ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan seperti saat ini menyebabkan terbukanya peluang bagi para kandidat untuk menjadikan “hadiah” sebagai media kampanye yang cukup efektif untuk mempengaruhi pemilih. Akibatnya, terbentuklah pola pikir dalam masyarakat bahwa kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi belum dapat dijadikan tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu.

Masyarakat akan sangat sulit menolak “hadiah” yang diberikan karena “hadiah” tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Bahkan ada yang menunggu-nunggu dan mengharap diberi sesuatu oleh kandidat tanpa mempertimbangkan hal itu boleh atau tidak dilakukan. “Hadiah” sebagai alat komunikasi politik menjadi media yang sudah layak dan lazim serta membudaya yang dilakukan setiap kali ada Pemilu di dalam masyarakat tanpa adanya pencegahan atau penindakan dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah.

Pemerintah seharusnya berpikir kritis dan membuat kebijakan-kebijakan hukum yang efektif untuk memberantas perilaku menyimpang tersebut demi meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa adanya pemberian “hadiah” sebagai media komunikasi politik, menindak tegas pelaku-pelaku yang melakukan praktek tersebut agar tercipta rasa takut untuk melanggar aturan Undang-Undang dan menjamin hak setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasinya tanpa gangguan dan pengaruh dari luar.

Contoh fenomena politik dengan “hadiah” berupa uang, berdasarkan hasil penelitian pada Pemilu legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2007,

memperlihatkan fenomena politik uang berjumlah Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 per suara. Tahun 2013 naik sebesar Rp 200.000 sampai dengan Rp 300.000 untuk satu suara, sehingga kandidat harus menyiapkan anggaran cukup besar (Rahmatiah HL, 2015).

Fenomena lainnya di Provinsi Bengkulu pada tahun 2014, berdasarkan informasi yang di peroleh dari beberapa tim sukses salah satu kandidat bahwa selain uang ada juga sembako, baju koko, dan nasi kotak yang dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya sebagai alat komunikasi politik. Di Kota Malang Jawa Timur tahun 2014, salah satu partai memberikan iming-iming “hadiah” undian berupa dua sepeda gunung, dua sepeda motor, dua televisi, dua kulkas, dua kompor gas untuk warga yang bersedia hadir dalam kampanye (Banjarmasinpost.co.id).

Fenomena tersebut sejalan dengan studi awal yang dilakukan oleh peneliti dimana dari hasil wawancara kepada salah satu warga di Komplek Serai Indralaya ditemukan fakta bahwa menjelang pemilu legislatif telah ada warga yang menerima uang sejumlah Rp 100.000 dari tim sukses salah satu kandidat dengan persyaratan memberikan foto copy KTP. Contoh kasus ini terjadi pada seorang pemilih pemula berusia 17 tahun dengan status belum bekerja dan belum memiliki pengalaman dalam hal memilih kandidat yang baik, sehingga akan sangat mudah bagi kandidat dalam mempengaruhinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih pemula dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat rentan menjadi sasaran para pelaku politik.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Kecamatan Indralaya bahwa Indralaya terdiri dari 20 (dua puluh) Kelurahan/Desa. Data jumlah Kelurahan/ Desa berikut tingkatan ekonominya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Table 1.1 Data Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kriteria di Kecamatan Indralaya Tahun 2011

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Rumah Tangga			Jumlah
		Mendekati Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lubuk Sakti	115	86	100	301
2	Tanjung Gelam	54	30	21	105
3	Tanjung Agung	148	29	8	185
4	Ulak Bedil	51	47	27	125
5	Sudi Mampir	72	155	56	283
6	Penyandingan	84	9	14	107
7	Ulak Banding	0	19	58	77
8	Muara Penimbung Ulu	157	194	162	513
9	Muara Penimbung Ilir				
10	Saka Tiga	188	120	162	384
11	Saka Tiga Seberang	79	12	2	93
12	Tanjung Seteko	944	203	284	1.431
13	Ulak Segelung	0	181	89	270
14	Indralaya Mulya				
15	Indralaya Raya	562	128	32	742
16	Indralaya Indah				
17	Talang Aur	211	74	14	299
18	Tunas Aur				
19	Tanjung Sejaroh	114	69	70	253
20	Sejaroh Sakti				
Jumlah		2.799	1.356	1.013	5.168

Sumber : Kantor Camat Indralaya, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan masyarakat di Kecamatan Indralaya masih cukup tinggi. Dimana rumah tangga dengan jumlah kemiskinan tertinggi yaitu di Kelurahan/Desa Tanjung Seteko. Penduduk Tanjung Seteko berjumlah 3.726 jiwa (lihat tabel 1.2). Desa Tanjung Seteko memiliki

jumlah penduduk yang cukup banyak jika dilihat dari data yang ada dan menampati angka kemiskinan yang paling tinggi sehingga sangat memungkinkan Desa ini akan menjadi salah satu subjek yang akan dipilih oleh kandidat saat memberikan “hadiah” khususnya bagi para pemilih pemula (lihat tabel 1.3) untuk mempermudah proses komunikasi politik di Desa tersebut.

Berikut tabel data jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Indralaya.

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga (KK) dan Rata-Rata Jiwa per Rumah Tangga di Kecamatan Indralaya Tahun 2017

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RT (KK)*	Rata-Rata Jiwa/RT (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lubuk Sakti	2.282	672	3,13
2	Tanjung Gelam	1.413	394	3,41
3	Tanjung Agung	1.267	405	3,04
4	Ulak Bedil	744	216	3,02
5	Sudi Mampir	2.626	576	3,34
6	Penyandingan	687	241	2,55
7	Ulak Banding	326	125	2,30
8	Muara Penimbung Ulu	1.609	488	3,07
9	Muara Penimbung Ilir	1.050	346	2,98
10	Saka Tiga	4.097	861	4,48
11	Saka Tiga Seberang	1.335	324	3,98
12	Tanjung Seteko	3.726	1.173	2,98
13	Ulak Segelung	1.269	353	3,05
14	Indralaya Mulya	6.982	1.884	3,54
15	Indralaya Raya	4.517	1.342	3,16
16	Indralaya Indah	4.174	1.012	3,87
17	Talang Aur	1.531	448	3,20
18	Tunas Aur	771	228	2,98
19	Tanjung Sejarah	1.499	528	2,65
20	Sejarah Sakti	1.061	246	4,22
Jumlah		42.402	39.895	3,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Ogan Ilir, 2018

Berikut tabel data pemilih pemula Desa/Kelurahan di Kecamatan Indralaya.

Tabel 1.3 Data Pemilih Pemula Desa/Kelurahan di Kecamatan Indralaya Tahun 2018

No	NAMA KEL/DESA	PEMILIH BARU		
		L	P	L+P
1	Indralaya Mulya	37	45	82
2	Indralaya Indah	19	28	47
3	Indralaya Raya	59	62	121
4	Lubuk Sakti	-	-	-
5	Tanjung Gelam	-	-	-
6	Tanjung Agung	5	-	5
7	TanjungSejaro	7	12	19
8	Sakatiga Seberang	2	-	2
9	Muara Penimbung Ulu	3	3	6
10	Tanjung Seteko	9	9	18
11	Sakatiga	-	-	-
12	Ulak Banding	6	6	12
13	Muara Penimbung Ilir	-	3	3
14	Talang Air	4	3	7
15	Ulak Bedil	-	-	-
16	Penyandingan	-	-	-
17	Sudimampir	8	8	16
18	Ulak Segelung	-	-	-
19	Sejaro Sakti	4	5	9
20	Tunas Aur	-	2	2
Jumlah		163	186	349

Sumber : PANWASLU Indralaya, 2018

Melihat fakta bahwa fenomena “hadiah” sebagai media komunikasi politik telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat ekonomi bawah hingga atas, dan dengan adanya pemilih pemula maka permasalahan ini harus dapat diantisipasi semaksimal mungkin. Permasalahan yang terkesan sederhana namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi

perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pemberian “hadiah” membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang *fair*. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa “hadiah” merupakan media yang cukup efektif digunakan oleh kandidat untuk menarik perhatian dan mempengaruhi para pemilih. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat studi kasus tentang “Hadiah’ Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Mempengaruhi Konstituen (Era Menjelang Pemilihan Calon Legislatif di Kecamatan Indralaya).

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Terdapat legislatif melakukan komunikasi politik menggunakan media berupa uang, barang, dan jasa untuk mempengaruhi masyarakat sebagai hadiah atau janji.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah efektifitas “Hadiah” Sebagai Media Komunikasi Politik dalam mempengaruhi konstituen (pemilih) dalam pemilu?

1.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti maka peneliti memberikan batasan pada masalah tersebut serta ruang lingkupnya agar dalam melakukan penelitian nantinya tidak akan melebar dan dapat mempermudah dalam melakukan analisis, batasan tersebut yaitu :

- 1.4.1 Peneliti hanya akan membahas mengenai bagaimana efektifitas “hadiah” berupa uang dan barang sebagai media komunikasi politik dalam mempengaruhi pemilih pemula di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya (Daftar jumlah pemilih pemula dapat dilihat pada tabel 1.3).
- 1.4.2 Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran efektifitas “Hadiah” Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Mempengaruhi Konstituen di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang besar dalam penerapan sistem komunikasi, sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran, sebagai sumber referensi untuk menambah wawasan serta informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi, khususnya mengenai “Hadiah” Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Mempengaruhi Konstituen di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya.

1.6.2 Manfaat Praktik

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian tentang “Hadiah” Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Mempengaruhi Konstituen di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai komunikasi politik yaitu cara kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif, sehingga dapat memberikan arahan dan gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk memilih seorang calon legislatif yang terbaik sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

1.6.2.3 Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan bagi KPU untuk bertindak lebih tegas dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dalam pemilu sesuai Undang-undang dan PKPU serta tindak

pidana pemilu sehingga dapat meminimalisasi terjadinya praktik politik yang melanggar aturan dan sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi dikalangan anggota legislatif yang tentunya akan merugikan negara ketika kandidat tersebut terpilih.

1.6.2.4 Bagi Tokoh Agama

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi para tokoh agama untuk merencanakan kegiatan keagamaan terkait pemilu yang memberikan penjelasan tentang pemilu yang sesuai dengan syariat agama khususnya agama mayoritas yaitu muslim.

1.6.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Hadiah” Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Mempengaruhi Konstituen dengan responden dalam lingkup yang lebih luas dan dengan metode penelitian lainnya sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai judul ini.